



Diplomasi Islam Indonesia dalam Konteks Asia Tenggara: Analisis Peran Strategis Indonesia dalam ASEAN Interfaith Dialogue

Fathan Rafiqi¹, Ali Maksum²

Abstract

This study examines how Indonesia implements Islamic diplomacy in the ASEAN Interfaith Dialogue as a regional soft power strategy. The problem formulation focuses on the effectiveness and challenges of Indonesia's moderate Islamic diplomacy in building regional tolerance. The objective is to analyze the strategies, actors, and impacts of this diplomacy in the context of ASEAN. This study uses a qualitative-descriptive approach with a single case study of Indonesia, supported by literature review and discourse analysis. The theories of soft power and norm entrepreneurship are used to understand the projection of Islamic wasathiyah values as an instrument of diplomacy. The results show that Indonesia's Islamic diplomacy has succeeded in establishing its position as a normative leader in the region through cooperation between the state and civil society. However, domestic inconsistency poses a serious challenge that could undermine its international legitimacy. In conclusion, Indonesia's Islamic diplomacy has the potential to be sustainable if it is supported by consistency in domestic and foreign values.

Keywords

Islamic Diplomacy; Soft Power; Asean Interfaith Dialogue; Moderate Islam; International Relations

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana Indonesia mengimplementasikan diplomasi Islam dalam ASEAN Interfaith Dialogue sebagai strategi soft power kawasan. Rumusan masalah berfokus pada efektivitas dan tantangan diplomasi Islam moderat Indonesia dalam membangun toleransi regional. Tujuannya adalah menganalisis strategi, aktor, dan dampak diplomasi tersebut dalam konteks ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kasus tunggal terhadap Indonesia, didukung metode studi pustaka dan analisis wacana. Teori soft power dan norm entrepreneurship digunakan untuk

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author:

Fathan Rafiqi, Program Magister Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, Indonesia

✉ fathan.rafiqi.psc24@mail.umy.ac.id



memahami proyeksi nilai Islam wasathiyah sebagai instrumen diplomasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi Islam Indonesia berhasil membangun posisi sebagai pemimpin normatif kawasan melalui kerja sama negara dan masyarakat sipil. Namun, ketidakkonsistenan domestik menjadi tantangan serius yang dapat mengurangi legitimasi internasional. Kesimpulannya, diplomasi Islam Indonesia berpotensi berkelanjutan jika ditopang konsistensi nilai dalam dan luar negeri.

Kata Kunci

Diplomasi Islam; Soft Power; ASEAN Interfaith Dialogue; Islam Moderat; Hubungan Internasional

Article history

Received 16 September 2025

Revised 15 November 2025

Accepted 2 December 2025

Published 13 December 2025

Cite this article

Rafiqi, F., & Maksum, A. (2025). Diplomasi Islam Indonesia dalam Konteks Asia Tenggara: Analisis Peran Strategis Indonesia dalam ASEAN Interfaith Dialogue. *Jurnal Politik Profetik*, 13(2), 170-188. <https://doi.org/10.24252/profetik.v13i2a4>

Pendahuluan

Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat beragam secara etnis dan agama, menjadikannya rentan terhadap konflik berbasis identitas (Mukrimin, 2023). Dalam konteks ini, ASEAN berperan sebagai platform regional yang mempromosikan stabilitas melalui berbagai mekanisme dialog, termasuk ASEAN Interfaith Dialogue. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan anggota penting ASEAN, memiliki posisi strategis dalam mendorong kerukunan lintas agama di kawasan. Diplomasi yang berbasis pada nilai-nilai Islam moderat telah menjadi instrumen penting bagi Indonesia untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan dialog antarumat beragama. Dalam kerangka ini, diplomasi Islam Indonesia bukan hanya refleksi dari kebijakan luar negeri, tetapi juga perlu dipahami sebagai strategi pembentukan norma regional (Haacke, 2009).

Konsep *soft power* oleh Joseph Nye (2004) menjadi fondasi teoretis untuk memahami pendekatan diplomasi Islam Indonesia. *Soft power* adalah kemampuan untuk mempengaruhi negara lain tanpa paksaan, melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakan. Indonesia menggunakan citra sebagai negara Muslim demokratis untuk menarik simpati negara-negara tetangga, sekaligus memperkuat identitas regional ASEAN sebagai kawasan damai dan multikultural. Melalui promosi nilai-nilai Islam wasathiyah (moderat), Indonesia menampilkan diri sebagai kekuatan normatif, bukan hegemonik. Ini merupakan bentuk diplomasi publik yang menekankan kekuatan moral ketimbang kekuatan militer atau ekonomi. Oleh karena itu, diplomasi Islam Indonesia di ASEAN merupakan aplikasi konkret dari teori *soft power* dalam konteks hubungan internasional Asia Tenggara.

ASEAN Interfaith Dialogue menjadi wadah strategis dalam merespons meningkatnya intoleransi dan ekstremisme keagamaan. Dialog lintas agama tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga meningkatkan daya tahan kawasan terhadap

konflik berbasis identitas. Indonesia, dengan pengalaman panjang dalam mengelola pluralisme domestik, memainkan peran sentral dalam pengembangan agenda interfaith di ASEAN. Pendekatan Indonesia menekankan inklusivitas dan kesetaraan antar pemeluk agama sebagai prinsip utama diplomasi Islam. Melalui forum ini, Indonesia memproyeksikan nilai-nilai universal Islam dalam kerangka multikulturalisme regional. Hal ini menguatkan posisi Indonesia sebagai pemimpin normatif di Asia Tenggara (Grzywacz, 2020).

Keberhasilan Indonesia dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di dalam negeri merupakan modal penting dalam pelaksanaan diplomasi luar negeri. Dalam teori *two-level games* oleh Robert Putnam (2017), kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh dinamika domestik dan internasional secara simultan. Dalam konteks ini, stabilitas sosial domestik memberikan legitimasi internasional bagi Indonesia untuk memimpin diplomasi antaragama. Pengalaman Indonesia dengan Pancasila, demokrasi, dan harmoni keagamaan memberikan kredibilitas bagi praktik diplomasi Islam di tingkat ASEAN. Dengan demikian, diplomasi Indonesia di ASEAN tidak terlepas dari legitimasi yang dibangun di dalam negeri, menjadikannya contoh konkrit dari diplomasi berlandaskan nilai.

Sejarah diplomasi Islam Indonesia tidak dimulai pada era Orde Baru, melainkan sudah berlangsung sejak masa Orde Lama dan bahkan sebelum kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Menteri Luar Negeri pertama Indonesia, telah menjadikan Islam sebagai bagian dari diplomasi kemerdekaan melalui pendekatan yang mengedepankan nilai universal Islam di fora internasional. Mohammad Natsir juga berperan penting dalam mengembangkan diplomasi Islam dengan membangun jaringan melalui Liga Muslim Dunia dan forum-forum solidaritas Islam global. Dalam era Orde Lama, pendekatan diplomasi Islam diformulasikan dalam kerangka identitas nasional yang berlandaskan Pancasila, namun tetap membuka ruang bagi Islam sebagai nilai moral dalam hubungan luar negeri. Upaya ini melanjutkan tradisi panjang peran ulama dan tokoh Muslim dalam diplomasi informal sejak masa kolonial. Oleh karena itu, artikulasi diplomasi Islam yang lebih terstruktur pada era Orde Baru dan Reformasi harus dipahami sebagai kelanjutan dari fondasi yang sudah dibangun sejak awal kemerdekaan (Damayanti, 2025; Othman et al., 2024; Sukma, 2011).

Indonesia menjadi salah satu inisiator ASEAN Interfaith Dialogue sejak awal 2000-an. Forum ini bukan sekadar ajang simbolis, tetapi dirancang sebagai instrumen *confidence-building* di kawasan yang rawan ketegangan agama. Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) memainkan peran penting dalam pengembangan kerangka kerja forum ini, dengan dukungan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Interfaith Dialogue dijadikan platform untuk mengarusutamakan Islam inklusif sebagai bagian dari diplomasi negara. Inisiatif ini merefleksikan pendekatan diplomasi *multitrack* di mana aktor negara dan non-negara bekerja bersama membangun agenda diplomasi luar negeri (Melissen, 2015).

NU dan Muhammadiyah memainkan peran krusial dalam mendukung diplomasi Islam Indonesia. Keterlibatan dua ormas besar ini menegaskan bahwa diplomasi

bukan monopoli negara, melainkan hasil kolaborasi berbagai aktor. Dalam pendekatan *transnational advocacy networks* oleh Keck dan Sikkink (2014), aktor non-negara dapat membentuk jaringan pengaruh lintas batas untuk memperjuangkan norma internasional. NU, misalnya, melalui Gusdurian Network dan Bayt ar-Rahmah aktif dalam promosi Islam rahmatan lil ‘alamin di forum global. Kekuatan sipil ini memperkuat narasi diplomasi Islam Indonesia di ASEAN dan memperluas legitimasi moral di mata negara-negara tetangga.

Kemenlu memiliki peran strategis dalam menginstitusionalisasi diplomasi Islam melalui pendekatan *interfaith dialogue*. Melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemenlu mendorong integrasi nilai-nilai Islam moderat dalam setiap kerja sama luar negeri, khususnya di ASEAN. Dalam perspektif *bureaucratic politics model*, diplomasi bukan hanya keputusan presiden, tetapi hasil tarik menarik antar lembaga. Kemenlu bekerja sama dengan institusi keagamaan, akademisi, dan media untuk menyampaikan narasi Islam damai ke publik internasional. Diplomasi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi melibatkan program kerja konkret seperti pertukaran pelajar, pelatihan lintas agama, dan forum pemuda antaragama. Dengan demikian, Indonesia menunjukkan diplomasi yang terstruktur dan berkelanjutan (Allison & Halperin, 1972).

Meskipun Indonesia kerap dipuji atas promosi Islam moderat, terdapat kontradiksi internal yang menantang kredibilitas diplomasi tersebut. Meningkatnya intoleransi di dalam negeri, seperti kasus pelarangan rumah ibadah minoritas dan retorika eksklusif dalam politik lokal, menjadi sorotan dunia internasional. Dalam kerangka teori *role conflict*, negara menghadapi ketegangan antara peran domestik dan peran internasional. Indonesia mempromosikan Islam toleran di luar negeri, tetapi menghadapi kesulitan menerapkan nilai tersebut secara konsisten di dalam negeri. Ketidakkonsistenan ini dapat mengurangi efektivitas diplomasi Islam Indonesia dan menurunkan daya tariknya di forum seperti ASEAN Interfaith Dialogue. Oleh karena itu, diplomasi nilai harus didukung oleh konsistensi kebijakan domestik untuk membangun kepercayaan regional (Holsti, 1970).

Dalam konteks ASEAN, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengembangkan diplomasi antaragama. Filipina, Malaysia, dan Thailand juga memiliki agenda serupa, meskipun dengan pendekatan berbeda. Misalnya, Filipina lebih fokus pada resolusi konflik di Mindanao melalui dialog agama, sedangkan Malaysia mengedepankan Islam Hadhari sebagai identitas diplomatik. Dibanding negara lain, Indonesia lebih menekankan pada diplomasi masyarakat sipil dan pengarusutamaan pluralisme. Dalam perspektif *comparative regionalism*, ini menunjukkan bahwa meskipun ASEAN memiliki tujuan kolektif, masing-masing negara mengembangkan strategi sesuai konteks domestiknya. Dominasi Indonesia dalam forum interfaith ASEAN bukanlah kebetulan, tetapi hasil dari kapasitas normatif yang telah dibangun sejak era reformasi (Yilmaz & Shukri, 2024).

Citra Indonesia sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di dunia menjadi kekuatan simbolik dalam diplomasi. Identitas ini digunakan untuk membangun narasi bahwa Islam dan demokrasi dapat berdampingan, membantah anggapan Barat

yang sering memandang Islam sebagai antitesis demokrasi. Dalam teori *norm entrepreneurship*, negara dapat menjadi agen penyebar norma internasional. Indonesia menggunakan citra ini untuk mendorong penerimaan terhadap nilai-nilai Islam moderat dalam forum regional. Dalam ASEAN Interfaith Dialogue, Indonesia bukan sekadar peserta, tetapi *norm entrepreneur* yang membentuk dan menyebarkan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan demokrasi berbasis Islam. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin moral di Asia Tenggara (Finnemore & Sikkink, 1998).

Bukti konkret dari diplomasi Islam Indonesia dapat dilihat dalam penyelenggaraan berbagai forum dialog antaragama di ASEAN. Salah satu contohnya adalah Indonesia-Australia Interfaith Dialogue dan ASEAN Youth Interfaith Camp yang diorganisir bersama Kemenlu. Program-program ini tidak hanya membangun jejaring antar pemuda lintas agama, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk penguatan toleransi. Dalam pendekatan *track two diplomacy*, inisiatif seperti ini dinilai lebih efektif dalam membangun perdamaian jangka panjang dibanding negosiasi formal. Keterlibatan langsung masyarakat sipil memperkuat daya jangkauan diplomasi dan memberikan legitimasi partisipatif terhadap nilai-nilai yang diusung. Diplomasi Islam Indonesia menjadi konkret melalui aktivitas yang menyentuh akar rumput (Melissen, 2015).

Keikutsertaan Indonesia dalam diplomasi antaragama ASEAN memberikan dampak positif terhadap stabilitas regional. *Interfaith dialogue* berperan sebagai instrumen *preventive diplomacy*, mencegah konflik sebelum membesar melalui mekanisme komunikasi terbuka. Ini sesuai dengan pendekatan *human security*, di mana keamanan tidak hanya diukur dari aspek militer, tetapi juga dari perlindungan hak dasar individu termasuk kebebasan beragama. Indonesia berkontribusi dengan menawarkan narasi Islam yang mendukung kerukunan dan menolak kekerasan atas nama agama. Dalam forum ASEAN, Indonesia juga memfasilitasi pertukaran pemahaman antarumat lintas negara yang berpotensi mengurangi stereotip dan prasangka. Diplomasi ini berfungsi sebagai jembatan sosial di kawasan yang kerap terpolarisasi oleh isu identitas (Emmers, 2009).

Meskipun memiliki banyak keunggulan, diplomasi Islam Indonesia juga menghadapi berbagai kritik. Beberapa akademisi menilai bahwa inisiatif *interfaith* Indonesia masih bersifat elitis dan belum menyentuh akar rumput secara maksimal. Selain itu, kurangnya evaluasi dan keberlanjutan program menyebabkan output yang tidak selalu berujung pada transformasi sosial. Dalam perspektif *critical constructivism*, penting untuk mengkaji apakah diplomasi ini benar-benar mengubah struktur sosial atau hanya sekadar representasi simbolik. Kritik lainnya mencakup kurangnya sinergi antara aktor negara dan non-negara, serta fragmentasi pesan diplomatik karena pergantian kebijakan antar rezim. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih integratif dan responsif terhadap konteks sosial budaya masing-masing negara ASEAN (Hoesterey, 2020).

Melalui serangkaian program, narasi, dan keterlibatan aktif dalam ASEAN Interfaith Dialogue, Indonesia telah menempatkan diri sebagai aktor utama dalam diplomasi Islam di Asia Tenggara. Posisi ini diperoleh bukan hanya karena demografi

Muslimnya, tetapi juga karena kapasitas untuk merumuskan nilai dan norma yang diterima secara regional. Ke depan, tantangan utama adalah menjaga konsistensi antara nilai yang dipromosikan dan realitas domestik. Dalam kerangka *strategic narrative theory*, Indonesia harus memastikan bahwa narasi Islam moderat yang dibangun tetap kredibel, kohesif, dan adaptif terhadap perubahan regional. Dengan begitu, diplomasi Islam Indonesia dapat terus menjadi kekuatan normatif yang berkelanjutan dalam pembentukan tatanan Asia Tenggara yang damai dan inklusif (Roselle et al., 2014).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam bentuk, strategi, dan dampak diplomasi Islam Indonesia dalam konteks ASEAN Interfaith Dialogue. Metode kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna sosial, politik, dan budaya yang melekat dalam praktik diplomasi antaragama. Dengan jenis studi kasus tunggal (*single case study*), penelitian ini berfokus pada Indonesia sebagai unit analisis. Strategi ini cocok untuk mengungkap dinamika kompleks antara kebijakan luar negeri, nilai Islam moderat, dan forum regional seperti ASEAN. Pendekatan ini telah digunakan secara luas dalam studi diplomasi publik dan hubungan internasional kontemporer.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi pustaka, termasuk analisis terhadap dokumen resmi ASEAN, pernyataan Kemenlu, publikasi ormas Islam (seperti NU dan Muhammadiyah), serta laporan kegiatan *interfaith dialogue*. Artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, dan laporan institusi terkait diplomasi Islam juga menjadi sumber utama. Selain itu, penelusuran media daring dilakukan untuk melacak narasi publik mengenai diplomasi antaragama Indonesia. Teknik ini dianggap efektif dalam studi hubungan internasional berbasis nilai dan identitas. Metode dokumentasi juga memungkinkan triangulasi antar-sumber sehingga meningkatkan validitas dan kedalaman analisis.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis wacana kualitatif (*qualitative discourse analysis*) untuk mengkaji bagaimana diplomasi Islam Indonesia dikonstruksi melalui narasi-narasi resmi dan representasi publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi ideologi, norma, dan strategi komunikasi yang digunakan dalam membentuk persepsi internasional tentang Islam Indonesia. Kerangka analisis menggunakan teori *soft power* dan *norm entrepreneurship* untuk menghubungkan bahasa diplomatik dengan tujuan politik dan sosial. Analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi tematik berdasarkan dokumen yang diperoleh. Pendekatan ini banyak digunakan dalam studi diplomasi berbasis nilai dan komunikasi strategis.

Pembahasan

Menelusuri Akar Diplomasi Islam Indonesia: Dari Kesultanan ke Kancah Regional

Diplomasi Islam Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan kompleks. Sejak masa Kesultanan Aceh, upaya untuk menjalin hubungan dengan dunia Islam global telah dilakukan, terutama dengan Kesultanan Utsmaniyah. Tujuan utama bukan hanya untuk mendapatkan dukungan militer, tetapi juga memperkuat legitimasi kekuasaan Islam lokal terhadap kolonialisme Eropa. Hubungan awal ini membentuk pola dasar diplomasi berbasis nilai Islam yang tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga identitasional. Studi terbaru menunjukkan bahwa narasi solidaritas Islam transnasional masih menjadi fondasi dalam praktik diplomasi Indonesia saat ini, dengan Islam tidak hanya sebagai keyakinan, tetapi juga sebagai perangkat lunak diplomatik (Damayanti, 2024).

Ketika kolonialisme Belanda semakin menguat, kanal diplomasi formal umat Islam Indonesia terhambat. Namun, jaringan ulama dan santri tetap menjadi aktor transnasional yang menyuarakan aspirasi politik ke dunia Islam. Melalui studi di Mekkah, Mesir, dan Hijaz, para tokoh Indonesia tidak hanya memperdalam keilmuan Islam, tetapi juga membentuk jaringan diplomatik informal. Jaringan ini terbukti efektif dalam memperkenalkan perjuangan Indonesia ke komunitas Muslim internasional, terutama saat menjelang kemerdekaan. Hal ini mencerminkan bahwa Islam tidak hanya menjadi kekuatan spiritual, tetapi juga alat komunikasi politik yang strategis (Zakaria, 2025).

Memasuki era kemerdekaan, diplomasi Islam Indonesia mengalami transformasi signifikan. Negara mengambil alih peran diplomasi dengan tetap mengintegrasikan nilai-nilai Islam sebagai identitas kultural (Mukrimin, 2023). Strategi ini tampak jelas saat Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika 1955, yang membawa semangat solidaritas Dunia Ketiga dan Muslim global. Islam diposisikan bukan sebagai alat dominasi, melainkan sebagai bahasa etis untuk membangun koalisi internasional. Dalam konteks ini, Indonesia berusaha memproyeksikan diri sebagai negara Muslim yang demokratis, pluralis, dan aktif dalam tatanan global (Othman et al., 2024).

Selama era Orde Baru, diplomasi Islam tidak menjadi prioritas negara secara eksplisit. Namun, di balik kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, terdapat dukungan implisit terhadap organisasi Islam internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Setelah reformasi 1998, politik luar negeri Indonesia lebih terbuka terhadap pendekatan nilai, termasuk nilai-nilai Islam. Pemerintah mulai mengintegrasikan Islam dalam diplomasi budaya, terutama melalui kerja sama dengan negara-negara OKI dan promosi Islam wasathiyah (moderat). Pendekatan ini mendapat sambutan di tingkat ASEAN, karena mampu menjembatani antara Islam dan demokrasi (Izoria, 2024).

Peran ormas, seperti NU dan Muhammadiyah, memperkuat diplomasi negara secara informal. NU aktif dalam forum ASEAN Interfaith Dialogue, menyuarakan Islam Nusantara sebagai model toleransi dan perdamaian. Muhammadiyah

berkontribusi melalui diplomasi pendidikan dan kemanusiaan, terutama di kawasan Asia Tenggara. Keterlibatan ormas ini memberikan legitimasi kultural terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, serta menunjukkan bahwa diplomasi Islam bukan semata proyek negara, tetapi kolaborasi antara aktor negara dan sipil (Damayanti, 2024).

Di ranah regional, Indonesia memainkan peran sentral dalam membentuk narasi diplomasi Islam di ASEAN. Melalui ASEAN Interfaith Dialogue, Indonesia mempromosikan pluralisme keagamaan sebagai bagian dari keamanan regional. Dalam forum ini, nilai-nilai Islam moderat diposisikan sebagai solusi atas meningkatnya intoleransi dan ekstremisme di Asia Tenggara. Diplomasi semacam ini menekankan pada nilai harmoni, inklusivitas, dan kesetaraan antaragama, yang merupakan karakter khas Islam Indonesia. Strategi ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai soft power di ASEAN (Othman et al., 2024).

Di tingkat global, diplomasi Islam Indonesia tercermin dalam sikap aktif terhadap isu-isu kemanusiaan seperti Palestina dan Rohingya. Indonesia menggabungkan pendekatan diplomatik dan kemanusiaan melalui jalur-jalur bilateral dan multilateral. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa diplomasi Islam tidak sekadar simbolis, melainkan menghasilkan dampak nyata dalam penyelesaian konflik. Dalam hal ini, Indonesia tampil sebagai negara Muslim yang tidak hanya responsif, tetapi juga solutif terhadap krisis kemanusiaan internasional, menjadikan Islam sebagai nilai universal (Onbasi & Onbasi, 2024).

Namun demikian, diplomasi Islam Indonesia tidak tanpa tantangan. Di tingkat domestik, polarisasi politik identitas dan meningkatnya konservatisme keagamaan dapat mengganggu konsistensi pesan yang disampaikan ke luar negeri. Di tingkat internasional, perbedaan pandangan dalam dunia Islam antara kelompok moderat dan konservatif juga menyulitkan pembentukan koalisi yang solid. Oleh karena itu, diplomasi Islam Indonesia perlu dijaga agar tetap berada dalam kerangka inklusif dan kontekstual, tanpa kehilangan prinsip-prinsip universal Islam (Zakaria, 2025).

Untuk memperkuat posisi diplomasi Islam, perlu penguatan kapasitas diplomat dalam pemahaman keislaman dan isu-isu keagamaan global. Selain itu, sinergi antara Kemenlu, lembaga pendidikan Islam, dan masyarakat sipil harus diperkuat. Ke depan, Indonesia dapat memimpin inisiatif regional seperti pembentukan Forum Islam ASEAN yang memfokuskan pada isu pendidikan Islam, perdamaian, dan resolusi konflik. Pendekatan ini sejalan dengan misi Indonesia sebagai poros moderasi Islam dunia (Damayanti, 2024; Izoria, 2024).

Keseluruhan narasi ini menunjukkan bahwa diplomasi Islam Indonesia bukanlah sesuatu yang baru muncul, tetapi telah berkembang melalui berbagai fase historis dari jaringan kesultanan, perlawanan kolonial, kemerdekaan, hingga era globalisasi saat ini. Dalam semua fase tersebut, Islam berfungsi sebagai instrumen identitas, kekuatan kultural, serta alat negosiasi dalam tatanan regional dan global. Dengan tetap mempertahankan prinsip wasathiyah, diplomasi Islam Indonesia memiliki potensi besar dalam menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat posisinya di dunia Islam kontemporer (Zakaria, 2025).

Membangun Harmoni Melalui Diplomasi Islam: Peran Indonesia dalam ASEAN Interfaith Dialogue

ASEAN Interfaith Dialogue menjadi wadah penting dalam memajukan pemahaman lintas agama di Asia Tenggara. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memainkan peran sentral dalam membentuk agenda dialog tersebut. Pemerintah Indonesia memanfaatkan pendekatan *soft diplomacy* berbasis nilai Islam Nusantara, yang menekankan toleransi dan koeksistensi damai. Melalui Kemenlu dan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, Indonesia mengusung nilai-nilai moderasi Islam ke dalam konteks kebijakan luar negeri ASEAN. Pendekatan ini diapresiasi luas oleh negara-negara anggota ASEAN, karena mampu meredakan ketegangan antar-komunitas di wilayah yang rawan konflik etnis dan agama (Ridwan et al., 2024).

Dialog antaragama yang diinisiasi Indonesia bukan sekadar diplomasi simbolik, tetapi telah menjadi strategi *soft power* yang konkret. Misalnya, penyelenggaraan ASEAN Youth Interfaith Camp oleh Indonesia menyasar pemuda lintas agama untuk membangun jejaring toleransi regional. Program ini menciptakan ruang interaksi yang aman, memperkuat diplomasi berbasis nilai Islam yang inklusif. Aktivitas ASEAN Youth Interfaith Camp mencerminkan model diplomasi publik Indonesia yang semakin dinamis pasca-2020, berfokus pada penguatan jejaring sosial lintas negara, yang memperkuat citra Indonesia sebagai pemimpin moral di ASEAN (Rahmayuni & Djumala, 2023).

Pentingnya diplomasi antaragama dalam konteks ASEAN tercermin dalam keterlibatan Indonesia pada forum Religion Twenty (R20), bagian dari G20 Religion Forum yang pertama kali diinisiasi Indonesia. Ajang ini memperlihatkan kemampuan diplomasi Islam Indonesia tidak hanya berskala regional, tetapi juga global. Dalam kerangka ASEAN, partisipasi aktif Indonesia dalam R20 menjadi model bagi pembentukan dialog antaragama ASEAN Plus. Indonesia memanfaatkan platform ini untuk mengadvokasi perdamaian berbasis ajaran Islam moderat dan memperkuat *soft power* keagamaannya di kawasan (Ridwan et al., 2024).

Strategi *interfaith diplomacy* Indonesia terbukti berhasil dalam menangani isu Rohingya. Melalui pendekatan lintas keagamaan, Indonesia menjembatani diplomasi ASEAN terhadap Myanmar yang bersifat normatif. Intervensi Indonesia lewat forum-dialog seperti Interfaith Humanitarian Forum menjadikan nilai Islam sebagai dasar kemanusiaan universal. Walaupun keterlibatan ASEAN dalam isu Rohingya bersifat terbatas, Indonesia tetap konsisten menyuarakan pentingnya peran agama dalam penyelesaian konflik kemanusiaan. Pendekatan ini mendorong ASEAN untuk lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan terkait minoritas agama (Pujayanti, 2018b).

Indonesia juga menggunakan diplomasi Islam sebagai sarana membangun citra global yang positif. Hal ini terlihat dalam penyelenggaraan World Peace Forum, yang menjadi bagian integral dari jaringan diplomasi antaragama ASEAN. Pendekatan Indonesia menekankan konsep Islam rahmatan lil 'alamin yang menjadi pilar utama

dalam World Peace Forum dan disinergikan dengan nilai-nilai universal ASEAN. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat kohesi sosial regional, tetapi juga menciptakan narasi Islam yang damai dan progresif dalam percaturan politik internasional (Damayanti, 2025).

Kekuatan diplomasi antaragama Indonesia juga tampak dalam narasi Islam Nusantara. Konsep ini mengedepankan praktik Islam yang kontekstual dengan budaya lokal, yang diterima luas di Asia Tenggara. Dalam forum ASEAN Interfaith Dialogue, narasi ini menjadi model yang diaplikasikan dalam berbagai inisiatif lintas batas, termasuk kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand. Narasi ini memperlihatkan bagaimana identitas keislaman Indonesia tidak hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga aset strategis kawasan yang memajukan diplomasi harmoni dan mencegah ekstremisme berbasis agama (Damayanti, 2024).

Keterlibatan ormas keagamaan dalam diplomasi antaragama ASEAN juga memperkuat akar sosial dialog lintas agama. NU, misalnya, terlibat aktif dalam menyusun agenda R20 dan Forum Agama Dunia. Organisasi ini dianggap sebagai representasi Islam Indonesia yang toleran, dan mendapatkan kepercayaan sebagai mitra resmi pemerintah dalam menjembatani kerja sama antaragama di ASEAN. Peran ganda ini antara negara dan masyarakat sipil memberikan fleksibilitas dalam diplomasi dan meningkatkan legitimasi Indonesia di mata komunitas internasional (Utama, 2024).

Di tingkat kebijakan, ASEAN telah memasukkan isu dialog antaragama dalam ASEAN Political-Security Community (Asean, 2015). Indonesia menjadi negara yang paling aktif dalam mendorong integrasi nilai toleransi ke dalam kebijakan keamanan regional. Indonesia tidak hanya berbicara soal Islam, tetapi juga memosisikan agama sebagai instrumen diplomasi preventif dalam menyikapi potensi konflik identitas di kawasan. Melalui pendekatan diplomasi Islam moderat, Indonesia aktif menyuarakan pentingnya nilai-nilai toleransi dan inklusivitas dalam forum regional seperti ASEAN Interfaith Dialogue, ASEAN Youth Interfaith Camp, dan Interfaith Humanitarian Forum. Misalnya, dalam respons terhadap krisis Rohingya, Indonesia menggunakan jalur *interfaith diplomacy* untuk mendorong penyelesaian damai dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa diplomasi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam meredam eskalasi konflik. Dengan demikian, agama difungsikan sebagai kanal komunikasi lintas budaya dan keyakinan yang memperkuat konstruksi ASEAN sebagai kawasan damai yang menjunjung multikulturalisme dan *human security* (Emmers, 2009; Pujayanti, 2018a; Ridwan et al., 2024).

Meski memiliki banyak pencapaian, Indonesia tetap menghadapi tantangan dalam menyelaraskan nilai-nilai pluralisme dengan tekanan politik identitas dalam negeri. Namun, melalui forum regional, Indonesia menunjukkan konsistensi dalam membangun jembatan kepercayaan antarnegara. Melalui ASEAN Youth Interfaith Camp, Indonesia mengajak pemuda lintas agama dari negara-negara ASEAN untuk berdialog dan membangun jejaring lintas kepercayaan secara inklusif. Sementara dalam forum R20 yang diinisiasi saat Indonesia menjadi Presidensi G20, Indonesia menampilkan Islam sebagai kekuatan etis yang mendukung dialog lintas iman dan

penolakan terhadap kekerasan berbasis agama. Kedua forum ini menjadi contoh bagaimana Indonesia menampilkan diri bukan hanya sebagai negara Muslim terbesar, tetapi juga sebagai pemimpin moral yang mengedepankan etika keadaban yakni cara berinteraksi internasional yang berbasis pada penghormatan, persamaan, dan narasi damai. Keberhasilan ini menjadi modal strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas regional (Baybado, 2025; Rahmayuni & Djumala, 2023; Ridwan et al., 2024).

Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam ASEAN Interfaith Dialogue membentuk pola diplomasi baru yang disebut sebagai *dialogue-based public diplomacy*. Pola ini menjadikan agama sebagai instrumen strategis dalam diplomasi luar negeri Indonesia. Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga menyumbangkan nilai-nilai universal yang memperkuat solidaritas regional. Indonesia telah berhasil memosisikan dirinya sebagai pusat diplomasi Islam yang moderat di ASEAN, memperkuat stabilitas kawasan melalui kerja sama antaragama yang berkelanjutan (Damayanti, 2023).

Islam Moderat dan Soft Power: Membangun Citra Indonesia dalam Diplomasi Kawasan

Diplomasi Islam Indonesia telah mengalami evolusi dari simbolisme ke arah strategi *soft power* yang terstruktur. Indonesia memanfaatkan Islam moderat khususnya melalui narasi Islam Nusantara sebagai daya tarik kultural dalam hubungan internasional, terutama di Asia Tenggara. *Soft power* ini tidak bersifat memaksa, melainkan membujuk melalui nilai toleransi, pluralisme, dan harmoni sosial. Pemerintah Indonesia menggunakan diplomasi budaya dan keagamaan ini untuk membentuk citra sebagai negara Muslim demokratis yang mampu menjembatani konflik. Strategi ini terbukti memperkuat posisi Indonesia dalam ASEAN, menjadikannya pemimpin moral dalam isu-isu multikulturalisme dan kebhinekaan (Damayanti, 2025).

Salah satu bentuk konkret *soft power* diplomasi Islam Indonesia adalah melalui program ASEAN Youth Interfaith Camp. Inisiatif ini menyatukan pemuda lintas agama dari seluruh Asia Tenggara untuk mendiskusikan perdamaian dan keberagaman. Indonesia menggunakan pendekatan partisipatif dan inklusif dalam diplomasi publik ini, menjadikan forum interfaith sebagai kanal diplomasi Islam non-konfrontatif. ASEAN Youth Interfaith Camp berhasil memosisikan Indonesia sebagai fasilitator regional dalam pendidikan antaragama dan diplomasi keagamaan. Selain mendukung citra positif Indonesia, kegiatan ini juga memperluas pengaruh nilai-nilai Islam moderat ke generasi muda ASEAN (Rahmayuni & Djumala, 2023).

Strategi *soft power* Indonesia juga mencakup diplomasi kultural berbasis diaspora dan migrasi Islam. Studi menunjukkan bahwa komunitas diaspora Muslim Indonesia di Malaysia, Singapura, dan bahkan Australia memainkan peran dalam membangun persepsi positif tentang Islam Indonesia. Melalui kegiatan keagamaan, budaya, dan sosial, komunitas ini menyebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin. Negara kemudian mendukung kegiatan ini secara diplomatik melalui kerja sama antaragama dan pendidikan berbasis komunitas. Strategi ini menciptakan "diplomasi

dari bawah” yang lebih personal dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan formal negara (Damayanti, 2024).

Indonesia juga menjalankan *Islamic Peace Diplomacy* sebagai bagian dari strategi *soft power* global. Forum-forum internasional seperti R20 dan World Peace Forum digunakan sebagai wadah promosi Islam Indonesia yang moderat. Dalam forum ini, Indonesia menampilkan Islam sebagai solusi, bukan sumber konflik. Pendekatan ini menciptakan narasi Islam damai yang sangat dibutuhkan di tengah meningkatnya ekstremisme global. *Soft power* diplomasi ini bukan hanya memperkuat posisi Indonesia dalam ASEAN, tetapi juga di forum G20 dan OKI. Indonesia tampil sebagai juru damai, bukan hanya di level nasional, tapi juga global (Seeth, 2023).

Kekuatan diplomasi Islam Indonesia juga tercermin dalam keberhasilan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah dalam memainkan peran internasional. NU, melalui jaringan Humanitarian Islam, berkolaborasi dengan organisasi lintas iman global. Muhammadiyah aktif membangun kerja sama pendidikan dan kesehatan dengan komunitas Muslim minoritas di Thailand dan Filipina. Pemerintah Indonesia mendukung aktivitas ini sebagai bagian dari *non-state soft diplomacy*. Peran ormas ini bukan hanya memperluas pengaruh Indonesia, tetapi juga menegaskan bahwa diplomasi Islam Indonesia bersifat terbuka, transnasional, dan berbasis masyarakat (Nubowo, 2023).

Soft power Islam Indonesia juga terlihat dalam strategi pendidikan luar negeri. Melalui beasiswa untuk mahasiswa ASEAN di Universitas Islam Negeri dan universitas Islam negeri lainnya, Indonesia memfasilitasi transformasi Islam moderat secara intelektual. Mahasiswa dari Kamboja, Thailand Selatan, dan Myanmar menerima pendidikan yang menekankan Islam toleran dan demokratis. Setelah kembali ke negaranya, mereka menjadi duta informal nilai-nilai Islam Indonesia. Program ini memperluas jejaring alumni yang loyal pada nilai pluralisme keislaman ala Indonesia, memperkuat posisi negara dalam diplomasi keagamaan kawasan (Hoesterey, 2020).

Dari perspektif geopolitik, *soft power* Islam Indonesia menjadi alternatif atas pengaruh negara lain seperti Arab Saudi dan Turki. Di Asia Tenggara, pendekatan Islam moderat Indonesia menjadi ‘penyeimbang’ terhadap varian konservatif yang sering diasosiasikan dengan ideologi transnasional. Melalui diplomasi budaya dan *interfaith engagement*, Indonesia menawarkan narasi Islam yang lokal, kontekstual, dan toleran. Ini menjadikan Indonesia mitra yang lebih diterima di negara-negara seperti Filipina, Laos, dan Vietnam dalam isu keagamaan. Narasi ini juga mengurangi kecurigaan terhadap Islam sebagai ancaman keamanan, yang masih menjadi isu sensitif di kawasan (Rakhmat et al., 2024).

Soft power Indonesia juga terefleksi dalam penyelenggaraan ajang-ajang internasional berbasis budaya, seperti Asian Games 2018. Meskipun bukan forum keagamaan, ajang ini digunakan untuk memperkuat citra Islam yang ramah dan progresif. Penampilan budaya Islam Indonesia, termasuk seni, musik, dan busana Muslim modern, membentuk persepsi global yang positif. Kombinasi antara *sport diplomacy* dan nilai keislaman menciptakan sinergi *soft power* yang fleksibel dan multidimensi. Stra-

tegi ini menunjukkan bahwa Islam dapat tampil dalam kerangka global yang modern dan damai (Trotier, 2021).

Namun, diplomasi soft power berbasis Islam tidak lepas dari tantangan. Polarisasi politik domestik dan munculnya radikalisme di tingkat lokal dapat mengaburkan narasi Islam moderat Indonesia di tingkat global. Isu Islam politik dan intoleransi terhadap minoritas kerap menjadi sorotan internasional yang melemahkan citra Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri berbasis Islam dengan konsistensi nilai di dalam negeri. Diplomasi Islam hanya akan efektif jika didukung oleh ekosistem toleransi yang nyata dan kebijakan internal yang sejalan dengan prinsip moderasi (Nur Mutia & de Archellie, 2023).

Soft power berbasis Islam telah menjadi instrumen vital dalam diplomasi luar negeri Indonesia. Melalui narasi Islam moderat, pendidikan, *interfaith diplomacy*, dan peran masyarakat sipil, Indonesia mampu membangun citra global sebagai kekuatan keagamaan yang damai dan progresif. Dalam konteks ASEAN, pendekatan ini bukan hanya memperkuat kerja sama regional, tetapi juga membentuk kerangka etik dalam hubungan antarnegara. Diplomasi Islam Indonesia telah bertransformasi menjadi proyek soft power yang strategis dan relevan dalam dunia yang semakin terpolarisasi (Song & Utama, 2025).

Diplomasi Islam Indonesia di Persimpangan Kawasan: Tantangan Kontemporer dan Prospek Regional

Meskipun diplomasi Islam Indonesia mengalami perkembangan positif, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalam konteks regional ASEAN. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman interpretasi Islam di negara-negara ASEAN. Filipina dan Thailand Selatan, misalnya, memiliki dinamika Islam lokal yang berbeda dari pendekatan Islam moderat Indonesia. Hal ini membuat pesan diplomasi Indonesia tidak selalu diterima secara utuh. Selain itu, adanya kecurigaan terhadap intervensi berbasis agama dari luar memperumit diplomasi berbasis nilai. Untuk itu, diplomasi Indonesia harus lebih adaptif terhadap konteks lokal tanpa kehilangan esensi nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin (Izoria, 2024).

Tantangan lain adalah meningkatnya politik identitas berbasis agama di dalam negeri, yang berpotensi melemahkan citra diplomasi Islam moderat Indonesia di luar negeri. Polarisasi politik, intoleransi terhadap minoritas agama, dan munculnya ekstremisme dalam negeri menciptakan paradoks antara nilai yang dikampanyekan Indonesia secara internasional dan realitas domestik. Negara-negara ASEAN mengamati perkembangan ini dengan cermat, sehingga setiap ketidakkonsistenan menjadi celah bagi kritik terhadap efektivitas diplomasi Islam Indonesia. Oleh karena itu, konsistensi antara kebijakan domestik dan diplomasi luar negeri menjadi kunci keberhasilan diplomasi Islam (Onbasi & Onbasi, 2024).

Ketergantungan pada aktor non-negara seperti NU dan Muhammadiyah dalam menjalankan diplomasi Islam juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun ormas ini efektif dalam menjangkau jaringan internasional, ketidakterkoordinasian dengan pemerintah dapat menciptakan fragmentasi pesan diplomatik. Dalam beberapa

kasus, perbedaan pendekatan antara negara dan ormas menciptakan kebingungan dalam narasi diplomasi Islam Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang sinergis antara diplomasi negara dan masyarakat sipil untuk memastikan keutuhan pesan dan arah kebijakan luar negeri (Amalia & Wulandari, 2025).

Secara geopolitik, Indonesia menghadapi kompetisi dari kekuatan lain seperti Arab Saudi dan Turki dalam membangun pengaruh Islam di Asia Tenggara. Kedua negara ini aktif mempromosikan versi Islam masing-masing melalui bantuan keuangan, pendidikan, dan lembaga keagamaan. Hal ini menciptakan kompetisi narasi Islam, yang terkadang melemahkan posisi Indonesia sebagai promotor Islam moderat. Untuk mengatasi ini, Indonesia harus menegaskan diferensiasi diplomatiknya dengan menawarkan nilai-nilai lokal yang unik, seperti Islam Nusantara, yang menekankan kesetaraan, budaya, dan demokrasi (Izoria, 2024).

Kurangnya platform resmi ASEAN yang secara institusional mendukung diplomasi agama menjadi kendala struktural bagi Indonesia. ASEAN masih menganut prinsip *non-interference* yang membatasi keterlibatan dalam isu-isu sensitif seperti agama. Ini membuat diplomasi Islam Indonesia harus berjalan secara informal melalui forum non-resmi seperti ASEAN Interfaith Dialogue. Ketidakterikatannya pada struktur ASEAN membuat hasil-hasil dialog tidak mengikat secara politik. Untuk itu, Indonesia perlu mengadvokasi agar diplomasi antaragama mendapat tempat lebih formal dalam kerangka kerja ASEAN Political-Security Community (Amalia & Wulandari, 2025).

Di sisi prospek, meningkatnya kebutuhan akan resolusi konflik berbasis nilai kemanusiaan dan agama membuka peluang besar bagi diplomasi Islam Indonesia. Kawasan Asia Tenggara kerap dilanda konflik horizontal berbasis agama, dan pendekatan Islam moderat Indonesia menjadi solusi yang potensial. Indonesia dapat memposisikan dirinya sebagai honest broker dalam konflik minoritas Muslim seperti di Rakhine, Mindanao, dan Patani. Dalam hal ini, Islam menjadi alat pemersatu, bukan pemisah, dan Indonesia bisa menjadi mediator yang netral dengan legitimasi kultural dan spiritual (Gencoglu, 2024).

Prospek lain adalah meningkatnya perhatian global terhadap pendekatan *soft power* dalam diplomasi, yang selaras dengan model diplomasi Islam Indonesia. Di tengah krisis global dan kecenderungan populisme, pendekatan yang berbasis nilai dan budaya menjadi alternatif strategis. Indonesia yang telah membangun citra sebagai negara Muslim demokratis, memiliki modal kuat untuk memimpin diplomasi berbasis etika. Penerimaan internasional terhadap R20 dan World Peace Forum menunjukkan bahwa diplomasi Islam Indonesia mulai mendapat tempat sebagai kekuatan lunak global yang kredibel dan berpengaruh (Onbasi & Onbasi, 2024).

Secara institusional, Indonesia perlu memperkuat kapasitas diplomatiknya dalam isu-isu agama dan keislaman. Pelatihan diplomat yang memahami aspek teologis dan sosial Islam penting untuk menjaga konsistensi pesan. Selain itu, keterlibatan lembaga pendidikan Islam seperti UIN dan pesantren perlu dilembagakan dalam strategi diplomasi nasional. Dengan memperkuat sumber daya manusia, Indonesia tidak hanya mampu membangun diplomasi yang responsif tetapi juga reflektif ter-

hadap dinamika Islam kontemporer dan kebutuhan kawasan (Amalia & Wulandari, 2025).

Teknologi digital juga membuka peluang baru untuk memperluas jangkauan diplomasi Islam Indonesia. Platform seperti media sosial, podcast, dan kanal YouTube yang dikelola oleh duta besar, tokoh ormas, dan lembaga pendidikan dapat menyebarkan narasi Islam toleran ke generasi muda ASEAN. Penggunaan media digital sebagai alat *soft power* tidak hanya memperkuat jangkauan pesan, tetapi juga memungkinkan interaksi dua arah yang membangun kepercayaan dan saling pengertian. Ini merupakan ruang strategis yang belum sepenuhnya dieksplorasi oleh diplomasi Indonesia (Izoria, 2024).

Tantangan dan prospek diplomasi Islam Indonesia di Asia Tenggara menunjukkan dinamika yang kompleks namun menjanjikan. Dengan terus mengembangkan pendekatan berbasis nilai, memperkuat sinergi aktor negara dan sipil, serta meningkatkan konsistensi antara kebijakan dalam dan luar negeri, Indonesia dapat menjadikan diplomasi Islam sebagai pilar utama hubungan regional. Di tengah lanskap geopolitik yang berubah cepat, Islam sebagai *soft power* bisa menjadi kunci bagi stabilitas, integrasi, dan kohesi ASEAN, jika dikelola dengan strategi yang adaptif dan berkelanjutan (Amalia & Wulandari, 2025).

Kesimpulan

Dalam kancah diplomasi Asia Tenggara, Indonesia telah membangun citra sebagai pemimpin normatif melalui proyeksi nilai-nilai Islam moderat dalam forum ASEAN Interfaith Dialogue. Keberhasilan ini tidak semata lahir dari kekuatan formal negara, melainkan dari kemampuan Indonesia mengartikulasikan Islam sebagai narasi etis yang inklusif, toleran, dan damai di tengah keragaman agama kawasan. Melalui pendekatan *soft power*, Indonesia menampilkan diri sebagai juru damai yang membawa Islam dari sekadar identitas religius menjadi platform diplomasi strategis. Keterlibatan aktif ormas seperti NU dan Muhammadiyah memperkuat posisi Indonesia sebagai pemangku nilai yang autentik dan representatif, sekaligus menjadikan diplomasi agama bukan monopoli elit negara, melainkan kolaborasi multiaktor yang dinamis.

Keberhasilan diplomasi Islam Indonesia juga menghadapi tantangan domestik yang tidak bisa diabaikan. Polarisasi politik identitas, meningkatnya intoleransi terhadap kelompok minoritas, serta inkonsistensi antara pesan diplomatik dan kenyataan sosial-politik dalam negeri berpotensi menggerus kredibilitas Indonesia di mata regional. Dalam kerangka teori *two-level games*, legitimasi internasional sangat bergantung pada stabilitas dan kohesi sosial di tingkat domestik. Jika nilai-nilai pluralisme hanya dipraktikkan sebagai narasi luar negeri tanpa pembenahan struktural di dalam negeri, maka posisi Indonesia sebagai *norm entrepreneur* di ASEAN akan sulit dipertahankan. Oleh karena itu, diplomasi Islam Indonesia hanya akan berhasil dan berkelanjutan jika ditopang oleh ekosistem domestik yang mencerminkan nilai-nilai yang sama: inklusif, demokratis, dan berkeadaban.

Ke depan, potensi Indonesia sebagai penggerak diplomasi Islam berbasis nilai di kawasan ASEAN sangat besar. Forum-forum seperti ASEAN Youth Interfaith Camp dan R20 menjadi bukti konkret dari komitmen Indonesia membangun narasi Islam yang ramah dan progresif. Namun, agar diplomasi ini tidak hanya menjadi etalase simbolik, Indonesia perlu memperkuat institusionalisasi nilai ke dalam kebijakan luar negeri yang berkelanjutan, sistematis, dan terlepas dari dinamika politis jangka pendek. Perluasan pengaruh Islam moderat juga harus menjangkau generasi muda melalui platform digital dan pendidikan transnasional yang membentuk jejaring lintas negara. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mempertahankan posisi sebagai pemimpin moral di ASEAN, tetapi juga dapat mengeksplor model diplomasi Islam Nusantara ke panggung global sebagai alternatif dari narasi Islam konservatif yang kini mendominasi diskursus internasional.

Kontribusi Penulis

Fathan Rafiqi: *Writing-original draft, Writing-review & editing, Conceptualization, Methodology.*

Ali Maksum: *Supervision, Validation.*

Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa artikel ilmiah ini adalah karya asli dan bebas dari unsur plagiarisme dalam bentuk apa pun. Seluruh sumber kutipan atau referensi yang digunakan dalam penulisan artikel ini telah dicantumkan secara lengkap dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Kami juga menyatakan bahwa artikel ini belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah mana pun, baik dalam versi cetak maupun digital, dan tidak sedang dalam proses pengajuan di jurnal lain.

Biografi

Fathan Rafiqi merupakan mahasiswa Program Pascasarjana Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Minat penelitiannya meliputi Kebijakan Luar Negeri. Penulis juga meraih gelar sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.

Ali Maksum merupakan dosen di Departemen Hubungan Internasional dan Program Magister Hubungan Internasional (MIHI), serta Kepala Pusat Penelitian Malindo Nusantara, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Referensi

Allison, G. T., & Halperin, M. H. (1972). *Bureaucratic politics: A paradigm and some*

- policy implications. *World Politics*, 24(51), 40–79.
- Amalia, N. R., & Wulandari, C. I. (2025). Indonesia's Role in ASEAN Regional Integration: An English School Perspective. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 10(1), 84–101.
- Asean. (2015). *ASEAN Political Security Community*. <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/>
- Baybado, P. A. (2025). Synodality as a framework for Christian-Muslim Dialogue in Asia. *Muslim Politics Review*, 4(1 SE-Articles), 113–147.
- Damayanti, R. (2023). Relevansi Fiqh Siyasa Dauliyah dan Agama sebagai Soft Power Dalam Hubungan Internasional: Upaya Indonesia Membangun Citra Islam Moderat Melalui Dialog Antar Agama dan Dialog Antar Peradaban. *The 22nd Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*.
- Damayanti, R. (2024). Islam, Migration, and Diaspora: Strengthening Indonesia-Malaysia Relations through Shared Heritage in International Affairs. *The 15th International Conference on Malaysian-Indonesian Studies (PAKMI15)*.
- Damayanti, R. (2025). Islam Nusantara and Local Traditions: Role and Challenges in Indonesia's Cultural Diplomacy and International Relations. *Mimbar Agama Budaya*, 42(1), 1–13.
- Emmers, R. (2009). Comprehensive security and resilience in Southeast Asia: ASEAN's approach to terrorism. *The Pacific Review*, 22(2), 159–177.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887–917.
- Gencoglu, H. (2024). Historical Relationship Between Indonesia and Türkiye. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, 4(2), 142–157.
- Grzywacz, A. (2020). Indonesia's (inter) national role as a Muslim democracy model: effectiveness and conflict between the conception and prescription roles. *The Pacific Review*, 33(5), 728–756.
- Haacke, J. (2009). The ASEAN Regional Forum: from dialogue to practical security cooperation? *Cambridge Review of International Affairs*, 22(3), 427–449.
- Hoesterey, J. B. (2020). Islamic soft power in the age of Trump: Public diplomacy and Indonesian mosque communities in America. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 31(2), 191–214.
- Holsti, K. J. (1970). National role conceptions in the study of foreign policy. *International Studies Quarterly*, 14(3), 233–309.
- Izoria, M. (2024). Geopolitics of the Middle East and ASEAN in Contemporary Political Dynamics. *International Scientific Journal: The Caucasus and the World*, 29, 150–157.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. A. (2014). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press.
- Melissen, J. (2015). Conclusions and key points about public diplomacy in East Asia. In *Understanding public diplomacy in East Asia: Middle powers in a troubled region* (pp. 239–252). Springer.
- Mukrimin. (2023). Identity Politics in Contemporary Southeast Asia. *Interdisciplinary*

- Political Studies*, 9(2), 109-128.
- Nubowo, A. (2023). Promoting Indonesian Moderate Islam on the Global Stage: Non-State Actors' Soft Power Diplomacy in the Post-New Order Era. *Muslim Politics Review*, 2(2), 238–283.
- Nur Mutia, R. T., & de Archellie, R. (2023). Reassessing China's Soft Power in Indonesia: A Critical Overview on China's Cultural Soft Power. *Cogent Arts and Humanities*, 10(1), 2178585.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. Public affairs.
- Onbasi, A., & Onbasi, E. P. (2024). Economic and Cultural Bridges: Necmettin Erbakan's Southeast Asia Trip (Singapore, Malaysia, and Indonesia). *Al-Risalah: Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS)*, 8(2), 1–26.
- Othman, Z., Mat, B., & Azman, M. D. (2024). Security and Diplomacy Amid Uncertainties. *SINERGI: Journal of Strategic Studies & International Affairs*, 4(2), 1–6.
- Pujayanti, A. (2018a). Interfaith Dialogue Indonesian Soft Power Diplomacy On Rohingya Issues. *Kajian*, 23(4), 295–309.
- Pujayanti, A. (2018). Interfaith Dialogue Soft Power Diplomasi Indonesia dalam Isu Rohingya. *Kajian*, 23(4), 295-309.
- Putnam, R. D. (2017). Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games. In *International organization* (pp. 437–470). Routledge.
- Rahmayuni, R., & Djumala, D. (2023a). Public Diplomacy in ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) to Develop Indonesia's Image in ASEAN. *SOSHUM: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 13(3), 294–305.
- Rakhmat, M. Z., Purnama, Y., & Kizhakke Purayil, M. S. (2024). United Arab Emirates' Soft Power Approaches towards Indonesia (2015-2022). *Suvannabhumi: Multidisciplinary Journal of Southeast Asian Studies*, 16(1), 271–301.
- Ridwan, R., Hanan, D., & Astuti, T. S. (2024). Examining New Public Diplomacy and Interfaith Dialogue in Indonesia: Cases of World Peace Forum (WPF) and Religion Twenty (R20). *Studia Islamika*, 31 (3), 477–510.
- Roselle, L., Miskimmon, A., & O'loughlin, B. (2014). Strategic narrative: A new means to understand soft power. *Media, War & Conflict*, 7(1), 70–84.
- Seeth, A. T. (2023). Indonesia's Islamic Peace Diplomacy: Crafting a Role Model for Moderate Islam. *GIGA Focus Asia*, 2(2), 1–11.
- Song, X. & Utama, V. R. (2025). From Indonesia to China: The Evolving Landscape of Santri Diplomacy. *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture*, 6(1), 1–20.
- Sukma, R. (2011). Soft power and public diplomacy: The case of Indonesia. In *Public diplomacy and soft power in East Asia* (pp. 91–115). Springer.
- Trotier, F. (2021). Indonesia's Position in Asia: Increasing Soft Power and Connectivity through the 2018 Asian Games. *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 9(1), 81–97.
- Utama, V. R. (2024). Nahdlatul Ulama's Strategic Role in Shaping Indonesian Foreign Policy. *Muslim Politics Review*, 3(2), 405-437.

- Yilmaz, I., & Shukri, S. (2024). *Islamist Parties and Power in Democratic Nation-States: A Comparative Analysis of Six Muslim-Majority Countries*. Springer Nature.
- Zakaria, F. (2025). Place, Species, and the Invisible in Indonesia's Environmental History. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 181(1), 78–81.